

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI BATU. 15 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG**

**Oleh  
Ongki  
Nim. 150574201012**

## **Abstrak**

Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di batu.15 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang dengan menggunakan teori Penanggulangan Kejahatan dan teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penanggulangan tindak pidana prostitusi oleh Polres Tanjungpinang melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu melalui 2 Upaya, yaitu Upaya penal dan Upaya non penal. Upaya Penal (*Refresif*) merupakan Suatu upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini menitikberatkan kepada sifat represif yakni suatu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polres Tanjungpinang melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak belum menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya dan pihaknya belum mampu untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan prostitusi atau kesusilaan di lokasi prostitusi batu.15. Upaya non penal (*Preventif*) yang berupa himbauan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan mengenai prostitusi serta menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku dan meminta kepada agama dan organisasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Tindak Pidana, Prostitusi

**MANAGEMENT OF THE CRIME OF PROSTITUTION IN BATU. 15 IN  
TANJUNGPINANG RESORT POLICE JURISDICTION**

**By  
Ongki  
Nim. 150574201012**

**ABSTRACT**

*Prostitution or prostitution is a mind boggling social issue, taking into account that prostitution is perhaps the most established development on the planet and is as yet present in our general public. Prostitution locally itself is considered to have disregarded the standards of conventionality which is one of the essentials of acting in the public arena. Profound quality, from a wide perspective, isn't just an issue of desire, however remembers all appropriate and sensible living propensities for a (certain) local gathering that are as per the attributes of the local area concerned. Moral standards in the public eye direct human way of behaving, however there are sanctions whenever abused. The motivation behind this exploration is to study and comprehend how the endeavors to beat the wrongdoing of prostitution in batu.15 in the Tanjungpinang Police Locale Regulation region by utilizing the hypothesis of Wrongdoing Avoidance and Policing. The technique utilized in this study is Exact Regulation, in particular exploration with field information as the primary information source, like the consequences of meetings and perceptions. The treatment of the wrongdoing of prostitution by the Tanjungpinang Police through the Ladies and Kids Administration Unit, to be specific through 2 endeavors, in particular reformatory endeavors and non-corrective endeavors. Reformatory Exertion (Refresive) is a work to defeat through criminal regulation. This work centers around the abusive idea of a move initiated after the wrongdoing has happened by upholding the law and forcing discipline as per the pertinent regulation. Tanjungpinang Police through the Ladies and Kids Administration Unit has not completed their obligations appropriately and they have not had the option to make a move and policing culprits of prostitution or respectability wrongdoings in batu.15. Non-punitive (Preventive) endeavors as requests to the local area and giving guiding about prostitution as well as encouraging general society to conform to material.*

*Keywords: Countermeasures, Crime, Prostitution*